



st2013
SENSUS PERTANIAN
Katalog BPS : 4102007.12.06

ANALISIS IPM

KABUPATEN TOBA SAMOSIR 2011

<http://tobasamosir.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR



st2013
SENSUS PERTANIAN
Katalog BPS : 4102007.12.06

ANALISIS IPM

KABUPATEN TOBA SAMOSIR 2011

<http://tobasamosir.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR

IPM

Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011

No. Katalog : 4102007.12.06

No. Publikasi : 12060.12.05

Gambar Kulit :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Naskah :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan data statistik, khususnya data mengenai kualitas sumber daya manusia Kabupaten Toba Samosir, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir telah menyelesaikan buku publikasi "**ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2011**".

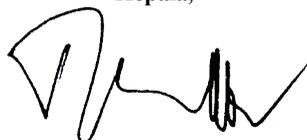
Publikasi ini menyajikan informasi mengenai kualitas sumber daya manusia, antara lain mengenai usia hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak yang disajikan berupa indeks, indikator dan tabel sederhana sehingga pengguna data dapat melihat kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Toba Samosir.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini, para peneliti, akademisi, dan pemakai data pada umumnya serta pemerintah dapat memanfaatkannya baik sebagai bahan evaluasi maupun bahan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas data dan penyajiannya di masa mendatang.

Balige, Agustus 2012

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**
Kepala,



DARWIS SITORUS, S.Si, M.Si
NIP. 19650801 198901 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	vi
B A B I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Konsep Pembangunan Manusia dan Pengukuran..	3
1.3. Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya	9
1.4. Indeks Pembangunan Manusia : Pengukuran Pencapaian Pembangunan	11
1.5. Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	14
1.5.1. Kedudukan IPM dalam Pembangunan Daerah	15
1.5.2. Sistem Informasi Pembangunan Manusia ...	17
1.5.3. Sumber Data Pemantauan Pembangunan Manusia dan Kerangka Kerjasama	18
B A B II. METODOLOGI PENELITIAN	21
2.1. Sumber Data	21
2.2. Konsep Definisi	21
2.3. Konsep IPM dan Tehnik Penghitungan	23
B A B III. KONDISI DAN POTENSI SOSIAL EKONOMI	27
3.1. Kependudukan	28
3.2. Pendidikan	32
3.3. Ketenagakerjaan	35

	3.4. Perekonomian	39
B A B IV.	KONDISI KOMPONEN-KOMPONEN IPM	43
	4.1. Indeks Pengetahuan	43
	4.2. Indeks Kelangsungan Hidup	48
	4.3. Indeks Daya Beli	50
B A B V.	STATUS DAN PERKEMBANGAN IPM.....	52
	5.1. Status Pembangunan Manusia	52
	5.2. <i>Reduksi Shortfall</i>	54
B A B VI.	HUBUNGAN IPM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	58
	6.1. Hubungan IPM dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi	58
	6.2. IPM dan Pendapatan Perkapita	60
B A B VII.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	63
	7.1. Kesimpulan	63
	7.2. Rekomendasi	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2011.....	27
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2011	29
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011	31
Tabel 3.4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011.....	33
Tabel 3.5. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2011	34
Tabel 3.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2011	36
Tabel 3.7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2011	37
Tabel 3.8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2011.....	38
Tabel 3.9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Samosir Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2011 (Juta Rupiah)	40

Tabel 4.1. Tingkat Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 dan 2011	44
Tabel 5.1. Status Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen IPM Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2011	54
Tabel 5.2. Target Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2011.....	56
Tabel 6.1. PDRB Perkapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2011....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi	8
Gambar 2. Tingkat Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2011.....	45
Gambar 3. Tingkat Buta Huruf Kabupaten Toba Samosir Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 dan 2011.....	46
Gambar 4. Persentase Penduduk Kabupaten Toba Samosir Menurut Pendidikan Tahun 2011	47
Gambar 5. Angka Harapan Hidup Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2003-2011	49
Gambar 6. Tingkat Daya Beli Penduduk Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2003-2011 (Ribuan Rupiah)	51
Gambar 7. IPM Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2011	53
Gambar 8. Target Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2011..	57
Gambar 9. Perkembangan PDRB Perkapita Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2010-2011	61

1.1. Latar belakang.

Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dalam kehidupannya harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya sebagai insan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan manusia memenuhi dimensi yang sangat luas dengan banyak pilihan, hanya mungkin tercapai jika penduduk tersebut memiliki :

- 1) peluang angka harapan hidup yang tinggi atau umur panjang dan sehat,
- 2) pengetahuan dan keterampilan atau keahlian, serta
- 3) peluang atau kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan yang produktif, sehingga penduduk memiliki daya beli.

Dengan kata lain manusia itu harus berkualitas, serta berproduktivitas tinggi sehingga dapat mencapai kehidupan yang layak.

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*.

Untuk mewujudkan tercapainya ketiga unsur tersebut dilakukan upaya konkret dan berkesinambungan. Misalnya untuk mencapai umur panjang ataupun Angka Harapan Hidup yang tinggi, harus didukung oleh tingkat kesehatan yang baik, status gizi baik dan semua prasarana lingkungan yang baik. Untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, manusia harus meningkatkan kualitas pendidikannya, pembangunan pendidikan harus diutamakan untuk meningkatkan angka melek huruf. Untuk itu rata-rata lama bersekolah harus diatas 12 tahun atau tamat SLTA. Disamping itu penduduk harus mempunyai kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan dan keterampilannya dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga dapat direfleksikannya dalam kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan bagi manusia. Dengan pendapatan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan terciptanya daya beli. Akhirnya dengan ketiga unsur di atas masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai standar hidup layak.

Selain itu secara umum pembangunan manusia dalam pengertian luas mengandung konsep teori pembangunan ekonomi konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia, terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*), bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Hubungan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat dan merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan (*United Nations Development Programme*, 1996).

Dalam rangka untuk tersedianya data yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Toba Samosir, dilakukan penelitian dan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian tersebut selain untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia, juga untuk melihat hubungan IPM dengan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan.

1.2. Konsep Pembangunan Manusia dan Pengukuran.

UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995:12).

Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan atau nafkah dan penciptaan lapangan pekerjaan. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus diperhatikan, tidak hanya untuk sekarang tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya (fisik, manusia, dan lingkungan) harus selalu diperbaharui (*replenished*).

Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan, karenanya pembangunan harus dari dan oleh penduduk, bukan hanya untuk mereka.

Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak berhenti sampai di sana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk berkreasi dan produktif, dan menikmati

kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jaminan hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia memiliki dua sisi. Sisi pertama berupa formasi kapabilitas manusia, seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi itu tidak seimbang, maka hasilnya adalah frustrasi masyarakat (UNDP, 1995 : II).

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas, jauh lebih dari pada teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*) bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Namun demikian, pembangunan ekonomi (atau lebih tepat pertumbuhan ekonomi) merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena pembangunan ekonomi menjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Menurut UNDP (1996), hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik seperti disajikan pada gambar 1, artinya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi

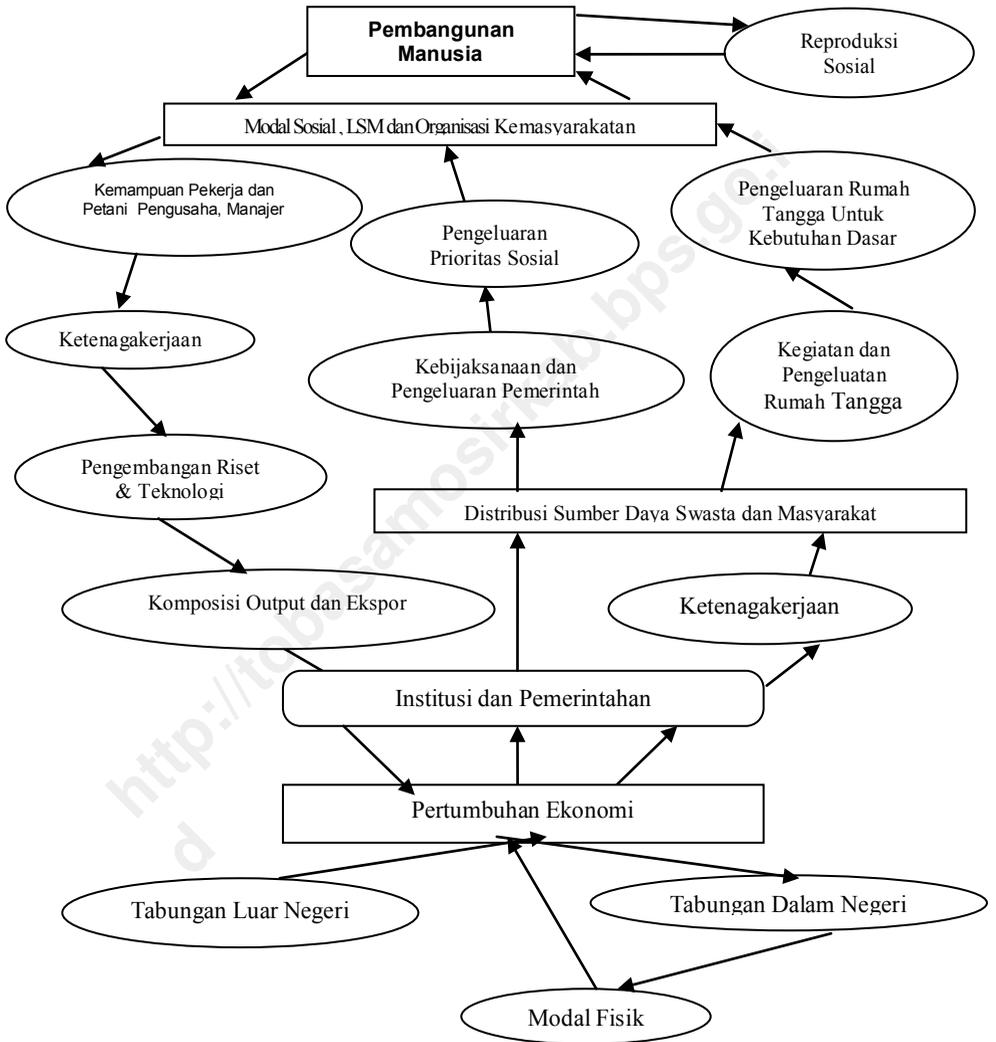
pembangunan manusia. Arah panah bawah-atas menegaskan arti penting pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Sukar dibayangkan ada negara yang dapat menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai. Arah panah atas-bawah yang merupakan asumsi dasar pendekatan SDM, merupakan penegasan adanya alasan ekonomis (*economic reasons*) dari pembangunan manusia yang keabsahannya terus ditunjang oleh bukti-bukti empiris.

Akan tetapi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara empiris terbukti tidak bersifat otomatis. Artinya, banyak negara (atau wilayah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diikuti oleh pembangunan manusia yang seimbang. Contohnya adalah Cina, Mongolia, Korea Utara dan Brasil (*Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2001; Kerjasama BPS, BAPPENAS dan UNDP*). Sebaliknya, banyak pula negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sedang tetapi terbukti dapat meningkatkan kinerja pembangunan manusia secara mengesankan. Contohnya Sri Lanka, Costa Rica, Trinidad dan Tobago (*Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2001; Kerjasama BPS, BAPPENAS dan UNDP*). Bukti empiris ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi pembangunan manusia. Namun pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini sesungguhnya merupakan tantangan bagi pelaksana pemerintahan untuk

merancang kebijakan yang mantap, sehingga hubungan keduanya saling memperkuat.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua jalur. Jalur *pertama* melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk sub sektor sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran itu merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur *kedua* adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa. Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya, penciptaan lapangan kerja merupakan "jembatan utama" yang menghubungkan keduanya (UNDP, 1996 : 87).

Gambar 1. Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : United Nations Development Programme (1996)

Hubungan atas bawah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia pada gambar 1 adalah jelas. Melalui upaya pembangunan manusia, kemampuan dasar dan keterampilan tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan manager akan meningkat. Selain itu, pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya akan mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan dan pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan pemerintah, distribusi sumber daya swasta dan masyarakat, modal sosial, LSM dan organisasi kemasyarakatan.

Lembaga pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting, karena keberadaannya sangat menentukan implementasi suatu kebijakan publik. Faktor distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata (misalnya dalam penguasaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya), hanya akan menimbulkan frustrasi masyarakat. Faktor modal sosial menegaskan arti penting peranan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Inti dari modal sosial adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan perilaku pemerintah. Semua faktor-faktor tersebut berperan sebagai suatu katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia secara efisien.

1.3. Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik fisik, mental

maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan dititikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Dirjen Pembangunan Daerah, 1998). Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk dilakukan pemerintah melalui pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang program pembangunannya dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar. Pada sektor ekonomi, asas pemerataan yang diimplementasikan antara lain adalah dengan memberikan kredit untuk petani berupa Kredit Usaha Tani (KUT), yang diperkirakan memberikan pengaruh yang besar karena sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak (Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 55% pada tahun 1985, 50% pada tahun 1990, 44% pada akhir dekade 1990-an dan mencapai 44,33% pada tahun 2002. Bahkan hingga saat ini pun, hampir 47 persen penduduk Sumatera Utara masih bekerja di sektor pertanian. Juga upaya pemberdayaan dilakukan usaha bagi penduduk miskin melalui Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra) serta Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra).

Penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha ditempuh secara makro ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan tumbuhnya kesempatan kerja dan berusaha

memungkinkan peningkatan pendapatan penduduk, yang secara nyata kemudian mengurangi jumlah penduduk hidup miskin. Hal ini merupakan 'jembatan utama' dalam meningkatkan daya beli melalui pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya merupakan prinsip pemberdayaan.

Pembangunan bidang sosial yang sangat mengesankan adalah upaya pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana. Upaya ini secara nyata telah berhasil menurunkan angka kelahiran hingga setengahnya (dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi 2,8 tahun 2000) yang kemudian berpengaruh pada pengurangan laju pertumbuhan penduduk. Dari sudut pandang pembangunan, keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk dalam konteks Indonesia, sesungguhnya merupakan upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup, oleh karena bagian terbesar penduduk Indonesia ditinjau dari berbagai indikator sosial (seperti angka kematian bayi, angka melek huruf, pendidikan yang ditamatkan penduduk, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat daya beli penduduk, dll) berada pada tingkatan kualitas yang masih rendah.

1.4. Indeks Pembangunan Manusia: Pengukuran Pencapaian Pembangunan

Pembangunan manusia menyangkut dimensi yang sangat luas. Upaya membuat pengukuran pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk, sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase pencapaian terhadap sasaran ideal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi

dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah :

- 1) umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup ataupun harapan hidup,
- 2) berpengetahuan dan berketerampilan, serta
- 3) akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia, dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, **(1) angka harapan hidup waktu lahir (e_0), (2) pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, (3) serta pengeluaran konsumsi.**

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu mampu mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Karena hanya mencakup tiga komponen (angka harapan hidup waktu lahir, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi) maka Indeks Pembangunan Manusia harus dilihat

sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks yang tercermin dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya (yang tidak seluruhnya dapat diukur) seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, pemerataan antar generasi.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan yang diakibatkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menurunnya kesempatan kerja (kesempatan kerja pada bulan Agustus 1997 mencapai 95,3%, menjadi 94,5% pada tahun 1998 dan 93,6% pada tahun 1999, pada tahun 2002 mencapai 90,94%) yang kemudian dipengaruhi tingkat inflasi yang tinggi selama tahun 1997–1998 (inflasi mengalami peningkatan dari 6% pada tahun 1997 menjadi 78% pada tahun 1998, pada tahun 2001 sebesar 12,55% dan 2002 sebesar 10,03%). Menurunnya tingkat kesempatan kerja dalam konteks pembangunan manusia, merupakan terputusnya jembatan yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Dampak krisis ekonomi pada pembangunan manusia adalah dengan menurunnya daya beli dan ini juga berarti terjadinya penundaan upaya peningkatan kapasitas fisik dan kapasitas intelektual penduduk.

1.5. Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai ukuran komposit tunggal, IPM (antara 0 – 100) menunjukkan tingkatan status pembangunan manusia di suatu wilayah yang kemudian berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan :

- i. antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan/kemunduran setelah suatu periode, atau
- ii. antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan/kemunduran suatu wilayah yang relatif dekat terhadap wilayah lain.

Untuk lebih memberikan petunjuk tentang status pembangunan manusia di suatu wilayah, sebagai alat ukur komposit, IPM harus dikaitkan dengan setiap indikator komponennya dan berbagai indikator lain yang berkaitan.

Di sektor perencanaan, pemanfaatan IPM terbatas hanya sebagai patokan dasar. Oleh karena itu perumusan kebijakan yang lebih terarah, kajian situasi pembangunan manusia perlu dilakukan di suatu wilayah untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu juga diperhatikan tingkat pencapaian setiap tahun. Karena itu kajian tentang pencapaian upaya pembangunan manusia perlu dilakukan dalam suatu periode tertentu. Tingkat pencapaian pembangunan manusia setiap tahun seharusnya menuju status pembangunan manusia yang ideal (*reduction in shortfall*) yang telah dihasilkan pada suatu periode, merupakan

validasi bagi kebijakan pembangunan yang telah diputuskan pada periode tersebut.

1.5.1. Kedudukan IPM dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan aktualisasi dari aspirasi masyarakat suatu bangsa, yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya sistematis dan terencana (Indeks Pembangunan Manusia Daerah Tingkat II Tahun 1990-1996; Kerjasama BPS, UNDP, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah). Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan merupakan tahapan yang menentukan bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan dalam GBHN dan Pola Dasar Pembangunan Daerah. Proses perencanaan meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap pelbagai program yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya. Kajian situasi dan kondisi yang obyektif tentang permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan pelbagai program pembangunan, perlu dilakukan untuk menentukan pentahapan, pencapaian tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek serta untuk menentukan prioritas. Melalui kajian tersebut dirumuskan suatu kebijakan umum yang akan menjadi pedoman bagi para perencana dalam merancang berbagai program.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yang akan datang. Hal ini merupakan langkah penting karena Indeks Pembangunan Manusia menduduki salah satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah, oleh karena pelaksanaan

pembangunan secara luas juga meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan pembangunan yang terarah.

Kedudukan dan peranan Indeks Pembangunan Manusia dalam manajemen pembangunan akan lebih terlihat kalau dilengkapi dengan *database* yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem *database* pembangunan manusia. Sistem *database* tersebut merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih lanjut yang dilakukan untuk mengenali lebih dalam permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya dan hasil-hasil serta dampak pembangunan manusia. Identifikasi tersebut dibuat ke dalam suatu analisis situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai kendala dalam implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya dan potensi yang dimiliki suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah pada periode yang akan datang. Proses ini merupakan kajian yang dapat menghasilkan rekomendasi bagi implikasi kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka IPM merupakan alat advokasi yang dapat digunakan para pengambil keputusan dan perumus kebijakan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil pada masa mendatang.

Penempatan IPM sebagai salah satu ukuran dan patokan dasar dalam penentuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah ditetapkan setelah berbagai kajian metodologis dan empirik dilakukan serta ujicoba

pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan.

1.5.2. Sistem Informasi Pembangunan Manusia

Analisis situasi merupakan suatu tahapan dalam proses perencanaan yang lazim dilakukan setelah visi dan sasaran jangka panjang ditetapkan. Analisis situasi yang cermat dan menyeluruh akan mempermudah tahapan perencanaan berikutnya yaitu penetapan prioritas dan sasaran jangka menengah dan jangka pendek, serta mengidentifikasi pilihan kebijakan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Dalam kerangka pembangunan manusia, analisis situasi harus dilakukan secara menyeluruh dalam arti mencakup semua aspek yang dianggap berkaitan dengan konsep global pembangunan manusia. Aspek-aspek yang dikaji dalam analisis tersebut disebut sebagai *issue* pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai alat ukur status pembangunan manusia sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi, sehingga IPM merupakan sistem informasi pembangunan manusia yang memusatkan perhatian pada kemajuan dan pencapaian program sektoral serta kajiannya dengan program nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, kajian ini disebut Analisis Situasi Pembangunan Manusia karena hanya mengkaji kemajuan suatu wilayah, sedangkan pada tingkat propinsi kajian ini disebut Laporan Pembangunan Manusia karena juga mengkaji perbandingan kemajuan dan pencapaian pembangunan antar kabupaten/kota dan indikator yang terhimpun dalam Sistem Informasi Pembangunan Manusia yang diperkaya dengan permasalahan spesifik daerah yang dikemukakan.

1.5.3. Sumber Data Pemantauan Pembangunan Manusia dan Kerangka Kerjasama

Data yang terhimpun dalam Sistem Informasi Pembangunan Manusia adalah data yang menggambarkan status pembangunan manusia pada tahun yang bersangkutan dan pencapaiannya. Pada tahun-tahun berikutnya data IPM akan diperbaharui dengan data yang baru, sehingga pemantauan tentang upaya pembangunan manusia dapat dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun.

Pemanfaatan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk perencanaan secara intensif, baru dilakukan di tingkat pusat. Di tingkat propinsi pemanfaatan data statistik belum seintensif yang dilakukan oleh BPS di tingkat pusat, terlebih lagi pemanfaatan di tingkat kabupaten/kota yang sangat sedikit. Hal ini terjadi karena dalam sistem pengumpulan data BPS sangat jarang dihasilkan data terpadu yang dapat mengkaitkan berbagai variabel agar dapat mengungkapkan fenomena dan perkembangan yang terjadi secara representatif untuk tingkat kabupaten/kota.

Dalam hal ini BPS sejak 1993 telah merancang Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) agar menjadi suatu alat untuk mengkaji dan memantau pelaksanaan pembangunan sektor sosial atau kesejahteraan rakyat, serta pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota setiap tahun. Selain itu, data SUSENAS dapat digunakan untuk mengkaji kaitan antar variabel sektoral, misalnya; kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, pengeluaran dan konsumsi rumah tangga untuk mengungkapkan perkembangan fenomena tertentu

misalnya perkembangan atau peningkatan kualitas hidup setiap tahun di masing-masing kabupaten/kota.

Pemanfaatan secara optimal dari data yang dihasilkan oleh BPS kabupaten/kota akan sangat membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Data yang semestinya dimanfaatkan dalam pembangunan daerah bukan saja data bidang sosial, tetapi juga data bidang ekonomi seperti Produk Domestik Regional Burto (PDRB), Statistik Keuangan Daerah, dan data pencatatan administrasi hasil pelayanan instansi sektoral akan memperkaya ketersediaan data dan kajian yang diperlukan para pengambil keputusan dan perumusan kebijakan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA propinsi/BAPPEDA kabupaten/kota) bekerja sama dengan BPS propinsi maupun BPS kabupaten/kota dalam hal penyediaan data, dan kajian yang diperlukan dalam penyusunan dan merancang program pembangunan. Oleh karena itu data yang dihasilkan oleh BPS, penting untuk didayagunakan. Dalam hal ini pendayagunaan akan lebih ditekankan pada data yang banyak digunakan dalam kerangka pembangunan manusia pada tingkat implementasi program sebenarnya, merupakan pembangunan sektor kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi pembangunan manusia dalam suatu wilayah, diperlukan suatu kelompok kerja yang beranggotakan BAPPEDA, BPS, instansi sektoral dan universitas yang mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

- 1) memperbaharui data dalam sistem informasi yang dapat dilakukan oleh BPS propinsi/BPS kabupaten/kota dengan dukungan BAPPEDA propinsi maupun BAPPEDA kabupaten/kota,

- 2) membuat analisis situasi pembangunan manusia, memanfaatkan data yang telah tersedia di daerah masing-masing.

Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok kerja secara bersama-sama dengan dukungan dan dipimpin oleh BAPPEDA. Pemantauan yang dilakukan ini merupakan kerjasama antara BPS – BAPPEDA.

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian lapangan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Toba Samosir, didukung oleh data sekunder baik dari BPS maupun dari instansi terkait lainnya.

2.2. Konsep Definisi

Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang pada umumnya merupakan wilayah kerja seorang pencacah. Blok sensus mempunyai batas yang jelas baik batas alam maupun buatan dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu sekitar 10 tahun.

Segmen adalah bagian dari blok sensus yang mempunyai batas jelas. Dengan perkataan lain blok sensus dibagi habis menjadi beberapa segmen.

Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga

Rumahtangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumahtangga biasa dan rumahtangga khusus :

Rumahtangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu

dapur adalah jika penggunaan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu. Selain rumahtangga biasa yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, yang juga dianggap sebagai rumahtangga biasa antara lain :

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makanannya secara sendiri.
- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur asal kedua bangunan tersebut masih dalam satu segmen.
- Suatu rumahtangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang.
- Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta anggota rumahtangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya.
- Masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri.

Rumahtangga khusus, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) yang berjumlah 10 orang atau lebih, **tidak dicakup dalam survei ini**.

Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk juga pendidikan yang disamakan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD).

Masih sekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

Konsumsi/Pengeluaran

Pengeluaran rata-rata perkapita perbulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga selama sebulan untuk konsumsi baik konsumsi makanan maupun bukan makanan semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga.

2.3. Konsep IPM dan Teknik Penghitungan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak

(*decent living*). Secara umum metode penghitungan IPM yang disajikan dalam publikasi ini sesuai dengan metode yang digunakan *The United Nations Development Programme (UNDP)* dalam menghitung HDI. Selain itu, dalam proses penghitungan IPM ini, BPS Kabupaten Toba Samosir memperoleh bantuan konsultasi teknis secara langsung dari BPS, dengan metode yang digunakan BPS untuk menghitung IPM antar Propinsi yang hasilnya sudah dua kali dipublikasikan (1995 dan 1997) .

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai penghitungan metode dan prosedur penghitungan IPM serta komponen-komponennya .

Usia Hidup

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan e_0 . Karena Indonesia tidak memiliki sistem vital registrasi yang baik, maka e_0 dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live – births*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Penghitungan e_0 dilakukan dengan menggunakan software *Mortpak Lite*. Angka e_0 yang diperoleh dengan metode tidak langsung ini merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

Pengetahuan

Seperti halnya UNDP, komponen IPM, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (*literacy rate*) penduduk 15 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (*mean-years of schooling*). Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi *Human Development Report* sejak *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Toba Samosir, 2011*

1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi karena alasan kesulitan memperoleh datanya, sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua kurang sesuai sebagai indikator dampak.

Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Standar Hidup Layak

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak. Penulisan ini menggunakan indikator 'rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan' (*adjusted real expenditure per capita*). Sumber data yang digunakan adalah SUSENAS dan survei-survei lain yang mendukung.

Tahapan Penghitungan IPM

Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (e_o , Pengetahuan, dan Standard Hidup Layak) dengan hubungan matematis sebagai berikut:

$$\text{Indek } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

X_i = Indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia ke- i
($i=1,2,3$)

X_{\min} = Nilai minimum X_i

X_{\max} = Nilai maksimum X_i

Persamaan di atas akan menghasilkan nilai $0 \leq X_i \leq 1$, untuk mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi $0 \leq X_i \leq 100$.

Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan hubungan matematis :

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pembangunan Manusia : IPM} &= 1/3 \sum_{i=1}^3 X_i \\ &= 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] \end{aligned}$$

dimana :

$X(1)$ = Indeks Angka Harapan Hidup

$X(2)$ = $2/3$ (Indeks Melek Huruf) + $1/3$ (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

$X(3)$ = Indeks Konsumsi Per Kapita yang disesuaikan

Tabel Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan	792.700	360.000	UNDP menggunakan GDP per kapita riil yang disesuaikan

Secara geografis Kabupaten Toba Samosir terletak di antara $2^{\circ}03'$ - $2^{\circ}40'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}56'$ – $99^{\circ}40'$ Bujur Timur dan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun di sebelah Utara, Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu di sebelah Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan sebelah Barat dengan Kabupaten Samosir. Luas Kabupaten Toba Samosir adalah $\pm 2.021,80 \text{ Km}^2$ meliputi 16 Kecamatan dan 244 Desa/Kelurahan (231 Desa dan 13 Kelurahan).

**Tabel 3.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan
Tahun 2011**

Kecamatan (1)	Luas (Km ²) (2)	Desa/Kelurahan		Jumlah (5)
		Desa (3)	Kelurahan (4)	
Balige	91,05	29	6	35
Tampahan	24,45	6	-	6
Laguboti	73,90	21	1	22
Habinsaran	408,70	21	1	22
Borbor	176,65	15	-	15
Nassau	335,50	10	-	10
Silaen	172,58	23	-	23
Sigumpar	25,20	9	1	10
Porsea	37,88	14	3	17
Pintu Pohan Meranti	277,27	7	-	7
Siantar Narumonda	22,20	14	-	14
Lumban Julu	90,90	12	-	12
Uluan	109,00	17	-	17
Ajibata	72,80	9	1	10
Parmaksian	45,98	11	-	11
Bonatua Lunasi	57,74	12	-	12
Toba Samosir	2.021,80	231	13	244

Sumber : Toba Samosir Dalam Angka 2012

3.1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Toba Samosir dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada akhir tahun 2007 (hasil backcasting Sensus Penduduk 2010) berjumlah 171.632 jiwa, pada akhir tahun 2008 (hasil backcasting Sensus Penduduk 2010) berjumlah 172.176 jiwa, pada akhir tahun 2009 (hasil backcasting Sensus Penduduk 2010) berjumlah 172.688 jiwa, pada pertengahan tahun 2010 (hasil Sensus Penduduk 2010) berjumlah 173.129 jiwa, dan pada pertengahan tahun 2011 (angka proyeksi berjumlah 174.748 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Toba Samosir ini menunjukkan adanya peningkatan, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Peningkatan jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Toba Samosir positif, yaitu sebesar 0,94 persen.

Sebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Toba Samosir masih timpang. Tidak merata atau timpangnya sebaran penduduk, tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Kabupaten Toba Samosir yang mempunyai luas wilayah 2.021,80 km², kepadatan penduduknya mencapai 86,43 jiwa per km². Kecamatan yang paling luas wilayahnya, yaitu Kecamatan Habinsaran, kepadatan penduduknya hanya mencapai 38,18 jiwa per km². Sedangkan daerah yang luas wilayahnya paling kecil, Kecamatan Siantar Narumonda, kepadatan penduduknya sudah mencapai 259,50 jiwa per km².

**Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut
Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2011**

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km ²)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Balige	18.487	18.521	37.008	406,46
2. Tampahan	2.183	2.150	4.333	177,22
3. Laguboti	9.021	9.508	18.529	250,73
4. Habinsaran	7.773	7.832	15.605	38,18
5. Borbor	3.451	3.396	6.847	38,76
6. Nassau	3.712	3.570	7.282	21,70
7. Silaen	6.035	6.174	12.209	70,74
8. Sigumpar	3.712	3.771	7.483	296,94
9. Porsea	6.721	6.784	13.505	356,52
10. Pintu Pohan Meranti	3.557	3.573	7.130	25,72
11. Siantar Narumonda	2.816	2.945	5.761	259,50
12. Lumban Julu	4.038	4.180	8.218	90,41
13. Uluan	4.032	4.062	8.094	74,26
14. Ajibata	3.648	3.649	7.297	100,23
15. Parmaksian	5.187	5.179	10.366	225,45
16. Bonatua Lunasi	2.501	2.580	5.081	88,00
TOBA SAMOSIR	86.874	87.874	174.748	86,43

Sumber : **Toba Samosir Dalam Angka 2012**

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Balige dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 406,46 jiwa per km². Sebaliknya daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Nassau dengan kepadatan penduduk hanya mencapai 21,70 jiwa per km². Secara keseluruhan ada 6 (enam) kecamatan yang kepadatan penduduknya di bawah rata-rata kepadatan penduduk kabupaten, yaitu Habinsaran (38,18 jiwa per km²), Borbor (38,76 jiwa per km²), Nassau (21,70 jiwa per km²), Silaen (70,74 jiwa per km²), Pintu Pohan Meranti (25,72 jiwa per km²), dan Uluan (74,26 jiwa per km²).

Bila dilihat komposisi penduduk menurut umur, ternyata Kabupaten Toba Samosir masih tergolong struktur umur muda. Ini ditunjukkan dari persentase penduduk umur muda (di bawah 15 tahun) sebesar 35,57 persen dan penduduk umur 65 tahun ke atas sebesar 6,33 persen. Hal ini memberikan implikasi bahwa kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil dan mandiri untuk mengisi pembangunan di masa yang akan datang.

Besarnya penduduk usia muda ini mengakibatkan beban tanggungan penduduk usia produktif juga semakin besar. Secara kasar angka ini dapat digunakan sebagai indikator pengukur kemajuan ekonomi dari suatu daerah. Rasio ini menyatakan perbandingan penduduk berusia di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun yang dianggap tidak produktif secara ekonomi dengan jumlah penduduk berusia 15 sampai 64 tahun yang dianggap produktif secara ekonomi. Makin tinggi rasio beban tanggungan berarti semakin kecil jumlah penduduk produktif dan semakin banyak sumber daya yang harus dibagikan kepada kelompok tidak produktif.

**Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut
Golongan Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2011**

Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	10 475	10 022	20 497
5-9	11 015	10 422	21 437
10-14	10 479	9 747	20 226
15-19	9 096	8 054	17 150
20-24	4 846	4 243	9 089
25-29	5 763	5 395	11 158
30-34	5 963	5 718	11 681
35-39	5 606	5 497	11 103
40-44	5 142	5 338	10 480
45-49	4 499	4 865	9 364
50-54	3 896	4 434	8 330
55-59	3 352	4 085	7 437
60-64	2 552	3 188	5 740
65+	4 190	6 866	11 056
JUMLAH	86 874	87 874	174 748
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN ANAK			61,22
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN USIA LANJUT			10,89
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN			72,11

Sumber : Toba Samosir Dalam Angka 2012

Beban tanggungan anak di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2011 sebesar 61,22 dan beban tanggungan usia lanjut sebesar 10,89. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 61,22 orang anak dan 10,89 orang usia lanjut. Dengan kata lain bahwa beban tanggungan di Kabupaten Toba Samosir masih cukup besar yaitu mencapai 72,11.

3.2. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia antara lain sangat tergantung kepada kualitas pendidikan. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi maupun sosial.

Pada tahun 2011, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah, menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Kabupaten Toba Samosir tidak bersekolah lagi, yaitu 73,65 persen (75,13 persen untuk penduduk laki-laki dan 72,29 persen untuk penduduk perempuan). Adapun penduduk yang masih sekolah sekitar 25,50 persen (24,78 persen penduduk laki-laki dan 26,15 persen untuk penduduk perempuan), sedangkan penduduk yang tidak sekolah/belum pernah sekolah masih ada sekitar 0,85 persen (0,08 persen untuk laki-laki dan 1,56 persen untuk penduduk perempuan).

Tabel 3.4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

STATUS PENDIDIKAN	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH	0,08	1,56	0,85
MASIH SEKOLAH			
- SD	8,33	7,16	7,72
- SMTP	9,26	9,63	9,45
- SMTA	6,64	8,49	7,60
- Diploma/Sarjana	0,56	0,88	0,73
TIDAK BERSEKOLAH LAGI	75,13	72,29	73,65
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : **Susenas 2011, BPS KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri, yakni merupakan usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perem Puan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH	0,08	1,56	0,85
TIDAK/BELUM TAMAT SD	12,87	17,42	15,24
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN			
- SD	24,06	21,48	22,72
- SMTP	22,13	21,45	21,77
- SMTA	33,93	30,28	32,03
- Diploma I/II	1,06	1,38	1,23
- Diploma III	1,85	2,73	2,31
- Diploma IV/Sarjana	4,02	3,71	3,86
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : **Susenas 2011, BPS KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Keadaan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Toba Samosir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama di tingkat Diploma/Sarjana. Hasil Susenas 2011 menunjukkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berhasil menamatkan pendidikan SD sampai dengan Perguruan Tinggi sebesar 83,92 persen, selebihnya sekitar 16,08

persen adalah mereka yang berpendidikan SD kebawah. Dari mereka yang telah menamatkan paling tidak SD tersebut, hanya sekitar 7,40 persen yang tamat Diploma/Sarjana dan 53,80 persen tamat pendidikan menengah. Di satu sisi, dari setiap 1000 orang berusia 10 tahun ke atas, hanya sekitar 74 orang diantaranya yang berpendidikan tingkat Diploma hingga Sarjana.

3.3. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) digolongkan sebagai :
(i) angkatan kerja, bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan dan secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, dan (ii) bukan angkatan kerja bila mereka bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berarti semakin besar keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas, dalam pasar kerja.

Persentase penduduk usia kerja di Toba Samosir yang bekerja adalah sebesar 78,71 persen dimana laki-laki sebesar 84,71 persen dan perempuan sebesar 72,90 persen. Sedangkan penduduk usia kerja yang mencari kerja ada sebanyak 2,07 persen.

Tabel 3.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2011

KEGIATAN UTAMA	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
ANGKATAN KERJA			
- Bekerja	85,13	61,24	72,75
- Pernah Bekerja	0,97	0,34	0,64
- Tidak Pernah Bekerja	0,001	2,14	1,11
BUKAN ANKATAN KERJA			
- Sekolah	7,21	6,84	7,02
- Mengurus Rumah tangga	0,64	25,55	13,55
- Lainnya	6,05	3,89	4,93
JUMLAH	100,00	100,00	100,00
T P A K	86,10	63,72	74,51
Tingkat Pengangguran Terbuka	1,13	3,89	2,35

Sumber : **Sakernas 2011, BPS KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

TPAK Toba Samosir berdasarkan hasil Sakernas 2011 adalah sebesar 74,51 persen. TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan, hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki lebih besar terlibat dalam pasar kerja. Adapun TPAK laki-laki sebesar 86,10 persen dan TPAK perempuan 63,72 persen. Tingkat pengangguran terbuka penduduk laki-laki sebanyak 1,13 persen dan penduduk perempuan sebesar 3,89 persen sehingga tingkat pengangguran terbuka secara umum sebesar 2,35 persen.

Lapangan pekerjaan utama yang terdiri dari sembilan sektor dibagi dalam tiga kelompok utama, yaitu sektor A (Pertanian dan Pertambangan/penggalian), sektor M (Industri, Listrik Gas dan Air serta Bangunan), serta sektor S (Angkutan, Perdagangan, Keuangan dan Jasa) atau ketiganya biasa disebut sebagai sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier.

Tabel 3.7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2011

LAPANGAN USAHA	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	68,33	71,22	69,64
2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3. Industri	3,55	5,08	4,25
4. Listrik, Gas, dan Air	0,00	0,22	0,10
5. Konstruksi	8,13	0,00	4,43
6. Perdagangan	12,34	21,86	16,67
7. Angkutan dan Komunikasi	5,37	0,00	2,93
8. Keuangan	0,72	0,00	0,39
9. Jasa	1,55	1,62	1,58
10. Lainnya	-	-	-
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : **Sakernas 2011, BPS KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Toba Samosir menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling menonjol, jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari hasil Sakernas 2011, sekitar 69,64 persen penduduk daerah ini bekerja di sektor pertanian, dan sisanya di sektor lainnya (30,36 persen). Tingginya persentase pekerja pada sektor pertanian di Kabupaten Toba Samosir, antara lain disebabkan daerah ini mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang pertanian dan didukung pula oleh daerahnya yang cukup luas.

Tabel 3.8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH	1,40	0,94	1,19
TIDAK/BELUM TAMAT SD	9,89	9,88	9,88
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN			
- SD	15,65	14,78	15,25
- SLTP	31,9	29,92	31,00
- SLTA	38,94	43,52	41,02
- Diploma I/II/III/IV/Sarjana	2,21	0,97	1,65
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : **Sakernas 2011, BPS KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Pendidikan penduduk yang bekerja masih cukup rendah. Hal ini dibuktikan dengan pendidikan yang ditamatkan pekerja untuk tingkat SD 15,25 persen, SLTP 31,00 persen, SLTA 41,02 persen, dan Diploma/Sarjana 1,65 persen. Bahkan persentase pekerja yang tidak/belum pernah sekolah mencapai 1,19 persen dan yang tidak/belum tamat SD mencapai 9,88 persen. Dengan demikian sebagian besar pendidikan pekerja sudah di atas SLTP (dengan persentase mencapai 42,67). Yang paling dominan adalah pekerja dengan pendidikan SLTA yang mencapai 41,02 persen. Pekerja dengan pendidikan yang ditamatkan lebih dari SLTA hanya mencapai 1,65 persen saja. Kondisi tersebut sangat memungkinkan mengingat lapangan usaha utama di Kabupaten Toba Samosir adalah pertanian tradisional, yang memang tidak membutuhkan pekerja dengan kualitas pendidikan tinggi. Tambahan lagi penduduk yang berpendidikan tinggi lebih banyak yang pergi keluar daerah untuk ikut terlibat langsung dalam pasar kerja, dan bersaing merebut pekerjaan untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak.

3.4. Perekonomian

Untuk menilai atau mengetahui berhasil atau tidaknya pembangunan yang dilakukan, perlu adanya suatu indikator guna mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan regional merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan untuk mengetahui berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan.

Salahsatu indikator makro dibutuhkan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba Samosir Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000. Produk Domestik

Analisis Indeks Pembangunan Manusia Toba Samosir, 2011

Regional Bruto (PDRB) disajikan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan maksud agar dapat ditelaah perkembangan PDRB sebelum dan sesudah pengaruh perubahan harga.

**Tabel 3.9. Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Toba Samosir Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2010 – 2011
(Juta Rupiah)**

Lapangan usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2000		
	2010 r)	2011 *)	% Tahun 2011	2010 r)	2011 *)	% Tahun 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	873.510,87	943.826,93	24,47	636.183,56	662.447,23	35,72
2. Penggalian	14.882,23	16.980,32	0,44	5.985,87	6.320,63	0,34
3. Industri pengolahan	1.459.327,13	1.663.228,80	43,12	610.505,71	641.665,47	34,60
4. Listrik, Gas dan Air Minum	36.345,07	39.991,77	1,04	18.239,90	19.552,02	1,05
5. Bangunan	225.687,59	270.272,12	7,01	77.793,26	84.724,34	4,57
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	345.293,00	387.286,43	10,04	165.098,87	176.269,11	9,50
7. Pengangkutan dan Komunikasi	108.777,23	118.725,75	3,08	63.214,24	66.530,71	3,59
8. Keuangan	100.818,86	110.656,36	2,87	51.813,40	54.678,26	2,95
9. Jasa-jasa	265.123,61	306.607,86	7,95	133.096,92	142.364,43	7,68
P D R B	3.429.765,59	3.857.576,34	100,00	1.761.931,72	1.854.522,20	100,00

Catatan : r) angka perbaikan
*) angka sementara

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2011 mencapai 5,26 persen. Sektor industri memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 43,12 persen, meningkatkan dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebesar 41,96 persen, sedangkan kontribusinya terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menempati posisi kedua setelah sektor pertanian, yaitu 34,60 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebesar 34,44 persen. Penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Kabupaten Toba Samosir adalah sektor pertanian. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 24,47 persen dan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menempati posisi pertama dengan kontribusi mencapai 35,72 persen.

Sektor penggalian mempunyai peranan yang sangat kecil bagi perekonomian di Kabupaten Toba Samosir. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya sumbangan yang diberikan sektor ini bagi pembentukan PDRB Kabupaten Toba Samosir, yang masing-masing sebesar 0,44 persen untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan 0,34 persen untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000. Sektor dengan sumbangan terkecil kedua adalah sektor listrik, gas dan air minum. Sumbangan sektor ini masing-masing 1,04 persen untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan 1,05 persen untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000.

Pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) yang cukup tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena hal ini sangat tergantung pada perkembangan jumlah penduduk. Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan

tetapi jika pertumbuhan penduduk tidak dapat ditekan maka pertumbuhan ekonomi tidak dapat meningkatkan PDRB perkapita masyarakat. Sedangkan bila terjadi pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) yang negatif akan menunjukkan terjadinya penurunan kesejahteraan rakyat. PDRB perkapita sebagai salah satu alat pengukur tingkat kemakmuran merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan dibanding tahun 2010, demikian pula dengan PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir Atas Dasar Harga Konstan 2000 mengalami kenaikan. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp. 19.626.923,28 menjadi Rp. 22.075.081,00 pada tahun 2011, sedang PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada tahun 2010 sebesar Rp. 10.082.700,00 naik menjadi Rp. 10.612.552,00 pada tahun 2011.

PDRB perkapita tidak mutlak dapat dikatakan sebagai pendapatan dari masyarakat pada daerah tersebut, karena Nilai Tambah Bruto (NTB) dari suatu kegiatan ekonomi pada suatu daerah belum tentu dinikmati seluruhnya oleh masyarakat daerah tersebut sehingga PDRB perkapita tidak dapat digambarkan langsung sebagai pendapatan perkapita.

4.1. Indeks Pengetahuan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Semenjak awal tahun 90-an pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang diharapkan meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah, dalam pendidikan dasar. Hal ini sesuai dengan salah satu amanat yang diemban pemerintah sesuai dengan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Toba Samosir berusaha semaksimal mungkin untuk mengemban amanat ini yang diaktualisasikan melalui Renstra Kabupaten Toba Samosir dan kebijakan pembiayaan melalui APBN dan APBD.

Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan, secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk berusia 15 tahun ke atas, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. Pada tahun 2010 angka melek huruf di Kabupaten Toba Samosir adalah 98,49 persen, lebih tinggi bila dibandingkan Propinsi Sumatera Utara yang tercatat sebesar 97,46 persen. Tabel 4.1. menyajikan angka melek huruf menurut jenis kelamin selama dua tahun terakhir disertai Propinsi Sumatera Utara sebagai bahan perbandingan. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan secara makro di

Kabupaten Toba Samosir sudah lebih tinggi dari Propinsi Sumatera Utara secara umum.

Tabel 4.1.
Tingkat Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2010 dan 2011

Jenis Kelamin	Toba Samosir		Sumatera Utara
	2010	2011	2011
[1]	[2]	[3]	[4]
Laki-Laki	99,59	99,73	98,72
Perempuan	97,21	97,35	96,20
Laki-laki + Perempuan	98,35	98,49	97,46

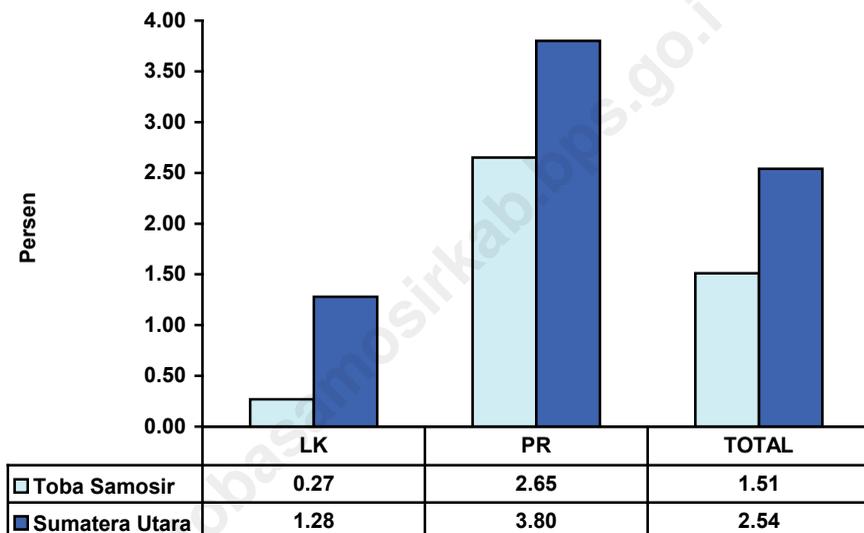
Sumber : **Susenas 2011, BPS Propinsi Sumatera Utara**

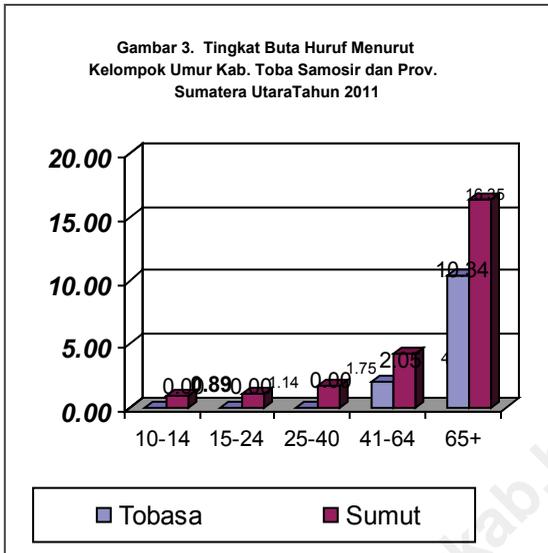
Jika dibandingkan dari tahun 2010, maka tingkat melek huruf di Toba Samosir pada tahun 2011 mengalami peningkatan. Tahun 2011, terlihat bahwa tingkat melek huruf laki-laki masih lebih tinggi yaitu 99,73 persen dibandingkan perempuan yang hanya sebesar 97,35 persen.

Indikator pendidikan lainnya yang merupakan kebalikan dari melek huruf adalah buta huruf. Tingkat buta huruf Kabupaten Toba Samosir lebih rendah di atas rata-rata Sumatera Utara.

Jika dirinci menurut jenis kelamin, maka tingkat buta huruf penduduk perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yaitu masing-masing 2,65 persen dan 0,27 persen.

Gambar 2. Tingkat Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2011



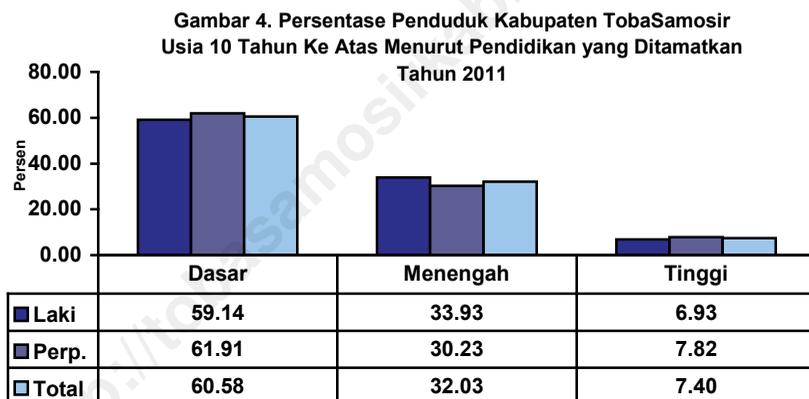


Tingkat buta huruf menurut kelompok umur di Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 3. Tingginya tingkat buta huruf di suatu daerah biasanya disebabkan oleh tingginya tingkat buta huruf pada kelompok umur tua, karena

penduduk jaman dahulu masih banyak yang belum memiliki pendidikan/tidak bersekolah. Pada saat ini rata-rata penduduk sudah sadar akan pentingnya pendidikan, namun yang perlu mendapat perhatian serius adalah jika tingkat buta huruf terjadi pada kelompok umur muda dengan angka yang cukup tinggi.

Tingkat buta huruf di Kabupaten Toba Samosir cukup tinggi terdapat pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Pada tahun 2011, tingkat buta huruf tidak terjadi pada kelompok umur 10-40, mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ukuran lain dari tingkat pendidikan yang menjadi indikator dari IPM adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa. Pada tahun 2011, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di Kabupaten Toba Samosir sebesar 9,85 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Toba Samosir sudah menyelesaikan tingkat pendidikan sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama bahkan sudah duduk di kelas satu SLTA. Kondisi ini sudah lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Sumatera Utara secara umum yang tercatat sebesar 8,91 tahun.



Untuk lebih memperjelas tingkat pendidikan yang ditamatkan, pada Gambar 4 disajikan penduduk Kabupaten Toba Samosir usia 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2011 sebesar 60,58 persen penduduk Kabupaten Toba Samosir tamat pendidikan dasar (SLTP ke bawah), sekitar 32,03 persen tamat pendidikan

menengah (SLTA), dan sisanya sebesar 7,40 persen tamat pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi).

Selanjutnya berkaitan dengan penentuan IPM, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu komponen pembentuk IPM adalah indeks pengetahuan. Indeks pengetahuan itu terdiri dari indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2011 dari hasil penghitungan indeks melek huruf di Toba Samosir tercatat sebesar 98,49 yang berarti masih kurang sekitar 1,51 point lagi untuk mencapai kondisi ideal yaitu 100. Indeks rata-rata lama sekolahnya pada tahun yang sama adalah sebesar 65,67 yang berarti masih jauh dari kondisi ideal. Sehingga dijumpai besarnya nilai indeks pengetahuan yang merupakan rata-rata tertimbang indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah adalah sebesar 87,55 dibutuhkan sekitar 12,45 point lagi untuk mencapai kondisi ideal dari indeks pengetahuan. Keadaan Toba Samosir ini jika dibanding dengan Sumatera Utara tentunya sudah lebih baik. Pada tahun yang sama indeks pengetahuan di Sumatera Utara adalah sebesar 84,77.

4.2. Indeks Kelangsungan Hidup

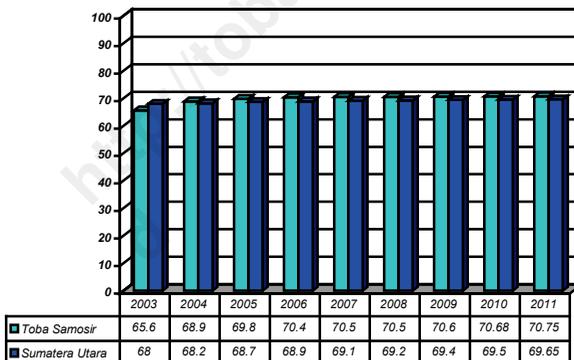
Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan sejak Pelita I antara lain bertujuan

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara makro semakin tinggi.

Angka harapan hidup di Kabupaten Toba Samosir dari tahun ke tahun diharapkan semakin meningkat. Berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2011 diperkirakan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Toba Samosir tercatat sekitar 70,75 tahun, meningkat dibanding tahun 2010 yang hanya sebesar 70,68 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Toba Samosir juga mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan angka Sumatera Utara secara umum maka dapat dikatakan kondisi kesehatan makro di Kabupaten Toba Samosir sudah lebih baik, hal ini digambarkan dengan angka harapan hidup penduduk Toba

Samosir yang sudah lebih tinggi dari angka harapan hidup Sumatera Utara yang tercatat 69,65 tahun pada tahun yang sama.

Gambar 5. Angka Harapan Hidup Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2003-2011



Sehubungan dengan pembentukan IPM, angka harapan hidup merupakan

komponen dalam membentuk indeks kelangsungan hidup. Dari data-data yang ada diperoleh bahwa indeks kelangsungan hidup penduduk

Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2011 adalah sebesar 76,25 sudah lebih tinggi jika dibanding dengan indeks kelangsungan hidup di Sumatera Utara yaitu sebesar 74,42. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan di Kabupaten Toba Samosir sebesar 0,12 point dari 76,13.

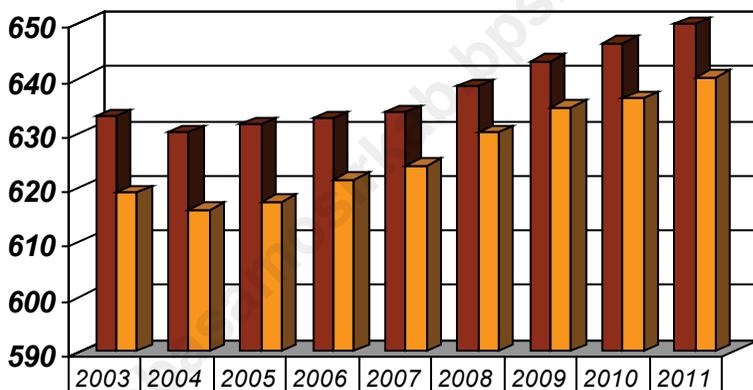
4.3. Indeks Daya Beli

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Indikator ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai bentuk barang/jasa sebagai pengeluaran. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga yang berlaku di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda dan selera/pola konsumsi masyarakat berbeda, oleh sebab itu pengeluaran perkapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

Pada tahun 2011 daya beli penduduk Toba Samosir diperkirakan sebesar 649.910 rupiah. Jika dibandingkan dengan Sumatera Utara secara umum, dapat dikatakan bahwa standar hidup penduduk Kabupaten Toba Samosir sudah lebih tinggi, yang ditunjukkan pada Gambar 6.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan indeks daya belinya, dari penghitungan diperoleh hasil bahwa indeks daya beli penduduk Kabupaten Toba Samosir tahun 2011 adalah sebesar 67,00 yang berarti masih jauh dari kondisi ideal yaitu 100 dan belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

Gambar 6. Tingkat Daya Beli Penduduk Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2003-2011 (Ribuan Rupiah)



■ Toba Samosir	633	630	631.6	632.6	633.8	638.6	643.1	646.4	649.9
■ Sumatera Utara	619	616	617.4	621.4	624.1	630	634.7	636.3	640.2

5.1. Status Pembangunan Manusia

Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam empat golongan yaitu :

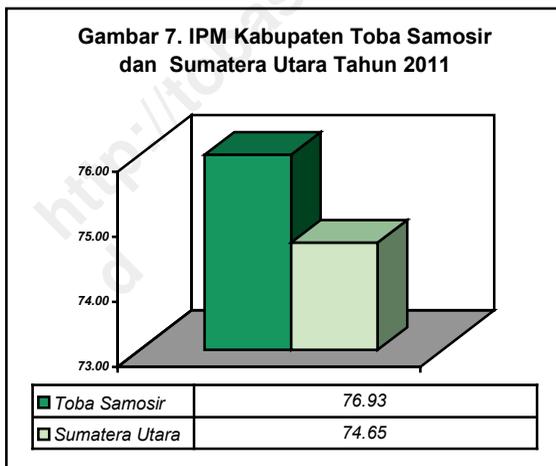
1. Rendah dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kurang dari 50
2. Menengah bawah dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia berada diantara 50 sampai 66.
3. Menengah atas dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia berada diantara 66 sampai 80.
4. Tinggi dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 80 keatas.

Untuk melihat perkembangan IPM kabupaten/kota, tingkatan Status Pembangunan Manusia ada 4 kriteria dimana status menengah dipecah menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah

tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi. Berikut ini disajikan uraian tingkatan status dengan kriteria sebagai berikut :

Tingkatan Status	Kriteria
Rendah	IPM < 50
Menengah bawah	$50 \leq \text{IPM} < 66$
Menengah atas	$66 \leq \text{IPM} \leq 80$
Tinggi	IPM > 80

Pada tahun 2011 IPM Toba Samosir adalah sebesar 76,93 dan berada pada status menengah atas, meningkat dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 76,55. Diperlukan usaha yang lebih keras untuk



meningkatkan status pembangunan manusia di Kabupaten Toba Samosir menjadi berstatus tinggi. Adapun cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan juga

kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Jika diperhatikan komponen-komponen pembentuk IPM di Toba Samosir, tampak bahwa kondisi pendidikan dan daya beli sudah lebih baik dari Sumatera Utara secara umum. Hal ini perlu dipertahankan dan kalau dapat ditingkatkan lagi pada masa mendatang. Komponen yang paling besar memberikan sumbangan bagi peningkatan IPM Kabupaten Toba Samosir adalah usia harapan hidup.

Tabel 5.1 Status Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen IPM Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2011

Komponen IPM	Toba Samosir		Sumatera Utara	
	Nilai	Status	Nilai	Status
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Indeks Harapan Hidup	76,25		74,42	
Indeks Pengetahuan	87,55		84,77	
Indeks Daya Beli	67,00		64,76	
IPM	76,93	Menengah Atas	74,65	Menengah Atas

Sumber : **Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara**

5.2. Reduksi Shortfall

Sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), biasanya digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dalam dua aspek. Aspek

pertama perbandingan wilayah relatif terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM yang dihitung berdasarkan komponen-komponen IPM yang disusun suatu peringkat kemajuan pembangunan manusia di pelbagai wilayah dalam kawasan yang sama. Aspek yang lain adalah mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode. Dalam hal ini, kemajuan dari pencapaian pembangunan manusia dikaitkan terhadap sasaran pencapaian ideal dari IPM yaitu = 100, serta IPM pada awal dan akhir periode. Pengukuran tingkat kemajuan pencapaian terhadap sasaran ideal IPM dihitung tiap tahun dalam satu periode, misalnya lima tahun, disebut **reduksi shortfall per tahun** merupakan gambaran yang terbanding dari kemajuan pencapaian atau kinerja pembangunan manusia di suatu kabupaten/kota. Semakin besar reduksi shortfall di suatu wilayah maka semakin besar kemajuan yang dicapai dalam periode tersebut. Dengan demikian **reduksi shortfall** dapat menunjukkan wilayah-wilayah mana yang maju lebih cepat/cepat dibandingkan dengan wilayah lain.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu diperhatikan tingkat pencapaian setiap tahun. Karena itu kajian tentang pencapaian upaya pembangunan manusia perlu dilakukan dalam suatu periode tertentu, yang memberi kesempatan untuk mengkaji dampak dari program bagi peningkatan kapasitas dasar penduduk. Tingkat pencapaian setiap tahun menuju status pembangunan manusia yang ideal (**reduction in shortfall**) yang telah dihasilkan pada suatu periode, merupakan validasi bagi kebijakan pembangunan yang telah diputuskan pada periode tersebut. Sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia, IPM biasa digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah (kabupaten/kota atau propinsi). Semakin besar **reduksi shortfall** di suatu

Analisis Indeks Pembangunan Manusia Toba Samosir, 2011

wilayah tersebut, berarti semakin besar kemajuan yang dicapai dalam periode tersebut. Dengan demikian maka seberapa besar kemajuan pencapaian pembangunan manusia setiap tahun di Kabupaten Toba Samosir dapat dilihat dengan ukuran ini, dan wilayah-wilayah mana yang maju lebih cepat/pesat dibandingkan dengan wilayah lain dapat ditentukan dengan besarnya *reduksi shortfall* dari masing-masing wilayah.

Data pada tabel 5.2. menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Toba Samosir tingkat kesejahteraan secara ekonomi yang digambarkan melalui daya beli masyarakat masih perlu mendapat perhatian serius begitu juga dengan komponen-komponen lainnya. Karena berdasarkan data yang diperoleh, dapat dikatakan hampir seluruh bagian/komponen pembangunan manusia di Kabupaten Toba Samosir masih perlu ditingkatkan untuk menuju sasaran ideal. Tampak pada tabel yang sama bahwa untuk tingkat daya beli masih diperlukan usaha dua kali lipat lagi, karena tingkat daya beli yang dicapai pada saat ini secara matematis masih setengahnya dari kondisi ideal.

Tabel 5.2 Target Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2011

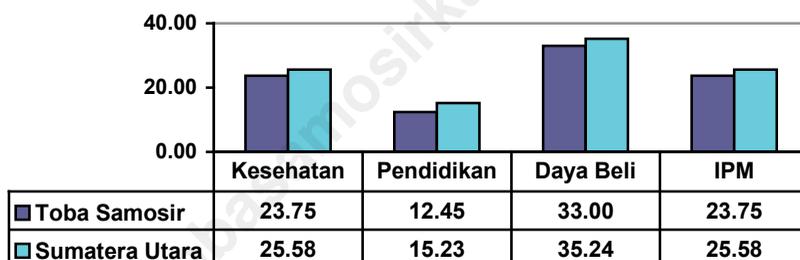
Komponen	Toba Samosir	Sumatera Utara
[1]	[2]	[3]
Indeks Harapan Hidup	23,75	25,58
Indeks Pengetahuan	12,45	15,23
Indeks Daya Beli	33,00	35,24
IPM	23,07	25,35

Sumber : **Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara**

Untuk tingkat kesehatan, kondisinya sudah lebih baik dari tingkat daya beli namun masih jauh dari kondisi ideal, sehingga masih diperlukan upaya ekstra juga, karena secara matematis tingkat pencapaian pada bagian kesehatan masih sekitar 76,25 persen. Sedangkan tingkat pencapaian pada bagian daya beli masih 67,00 persen.

Tingkat pencapaian kondisi ideal di sektor pendidikan masyarakat Kabupaten Toba Samosir sudah lebih tinggi dibanding dengan sektor lainnya. Data menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kondisi ideal pada sektor pendidikan sudah sekitar 87 persen.

Gambar 8. Target Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2011



Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian kondisi ideal pembangunan manusia di Kabupaten Toba Samosir adalah baru mencapai 76,93 persen atau secara matematis baru sekitar dua per tiganya dari kondisi ideal. Jika dibanding dengan kondisi Sumatera Utara secara umum bahwa tingkat pencapaian kondisi ideal pembangunan manusianya sudah lebih tinggi karena pada tahun yang sama tingkat pencapaian pembangunan manusia di Sumatera Utara adalah sekitar 74,65 persen.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk dapat mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah (*UNDP*). Hal ini merupakan langkah penting karena IPM merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur pelaksanaan manajemen pembangunan daerah. Oleh karena pelaksanaan pembangunan secara luas juga meliputi unsur pemantauan evaluasi, maka fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi indikator kunci bagi terlaksananya pembangunan.

Sebaiknya daerah yang memiliki PDRB yang sudah relatif tinggi mengupayakan agar pola pertumbuhan ekonominya kondusif bagi kenaikan IPM yaitu melalui kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan yang merata secara sektoral dan positif terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi mendukung pertumbuhan PDRB ataupun peningkatan daya beli masyarakat.

6.1. Hubungan IPM dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam GBHN konsep pembangunan menganut konsep pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Konsep pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menghendaki peningkatan kualitas penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. Secara eksplisit mungkin dapat kita terjemahkan, bahwa pembangunan yang dilaksanakan itu harus dititikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang

seiring dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan manusia. Artinya pembangunan ekonomi yang mantap menjadi prasyarat untuk melaksanakan pembangunan manusia. Suatu wilayah akan sangat sulit melaksanakan pembangunan manusia jika kondisi perekonomiannya tidak menentu, seperti yang terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi. Demikian pula secara tidak langsung pembangunan manusia juga mempengaruhi pembangunan ekonomi. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai input, dimana produknya adalah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi. Kuatnya hubungan timbal balik tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh kelembagaan pemerintah karena keberadaannya sangat menentukan implementasi kebijakan publik. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebagai tempat lahirnya kebijakan pembangunan termasuk pembangunan manusia sangat berperan terhadap berhasil tidaknya pembangunan.

Tabel 6.1. PDRB perkapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2011

INDIKATOR	Toba Samosir		Sumatera Utara	
	2010	2011	2010	2011
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
PDRB Perkapita	19.810.460^{†)}	22.075.081^{*)}	21.236.780^{†)}	23.974.860^{*)}
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,50^{†)}	5,26^{*)}	6,35^{†)}	6,58^{*)}
IPM	76,55	76,93	74,19	74,65

†) Angka Perbaikan, *) Angka Sementara

Sumber : **BPS SUMATERA UTARA**

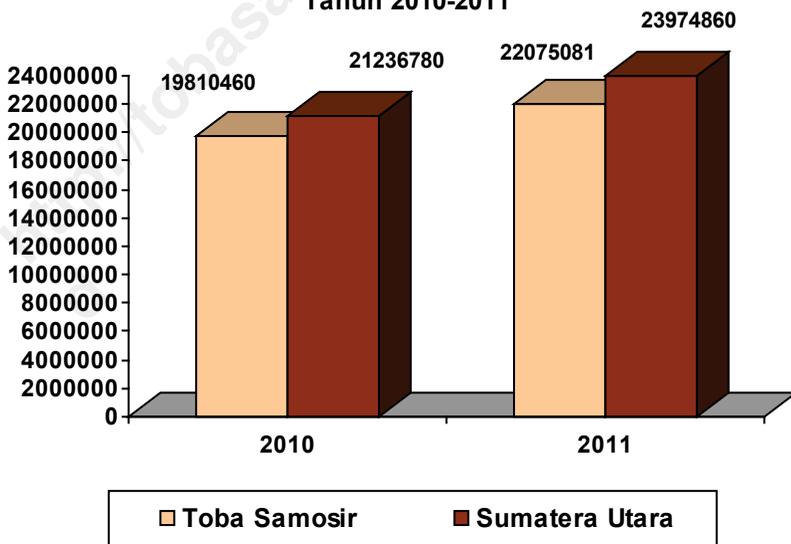
Dari Tabel 6.1. tersebut, menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi/PDRB dengan pembangunan manusia adakalanya membentuk hubungan yang linier. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toba Samosir sebesar 5,26 persen, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang tercatat sebesar 6,58 persen pada tahun yang sama. Jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi Toba Samosir dan Sumatera Utara dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami perlambatan/deselerasi, tetapi untuk Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toba Samosir relatif lebih tinggi dibandingkan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara.

6.2. IPM dan Pendapatan Perkapita

Adanya hubungan timbal balik walaupun tidak bersifat otomatis, antara pembangunan manusia dengan PDRB perkapita terlihat pada tabel 6.1. Pada tabel tersebut terlihat bahwa hubungan itu linier mengikuti suatu pola yang secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut. Bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB perkapita rendah akan berusaha meningkatkan pertumbuhannya dan kenaikan angka tersebut cenderung akan diikuti oleh kenaikan IPM secara cepat. Tetapi bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB perkapita yang relatif tinggi maka tidak selalu kenaikan PDRB perkapita yang tinggi tersebut akan diikuti oleh kenaikan IPM yang tinggi juga. Karena jika kenaikan PDRB perkapita tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia maka kenaikan PDRB tersebut tidak akan menghasilkan perubahan pembangunan manusia.

Implikasi dari pola hubungan tersebut adalah bahwa bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB perkapita rendah maka tantangan untuk meningkatkan IPM secara efektif harus dilakukan melalui upaya peningkatan PDRB perkapita. Sebaliknya bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki PDRB perkapita yang sudah relatif tinggi, maka tantangan yang dihadapi adalah mengupayakan agar pola pertumbuhan ekonominya kondusif bagi IPM, yaitu melalui kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan yang merata secara sektoral dan positif terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan seperti: sekolah, kesehatan, kehidupan yang layak dan lain-lain.

**Gambar 9. Perkembangan PDRB Perkapita
Toba Samosir dan Sumatera Utara
Tahun 2010-2011**



Hubungan IPM dengan PDRB perkapita seperti terlihat pada tabel 6.1 bersifat linier. Hal ini terlihat bahwa di Kabupaten Toba Samosir tahun 2010-2011 mengalami peningkatan nilai IPM sebesar 0,38 point sedangkan PDRB perkapita mengalami peningkatan dari Rp. 19.810.460,- pada tahun 2010 menjadi Rp. 22.075.081,- pada tahun 2011 atau naik sebesar 11,43 persen.

Demikian juga dengan Propinsi Sumatera Utara, tahun 2010-2011 mengalami peningkatan nilai IPM sebesar 0,46 point dan PDRB perkapita juga mengalami kenaikan dari Rp. 21.236.780,- pada tahun 2010 menjadi Rp. 23.974.860,- pada tahun 2011 atau naik sebesar 12,89 persen . Hal ini menunjukkan bahwa PDRB perkapita yang tinggi akan diikuti oleh peningkatan IPM.

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan juga penjelasan-penjelasan yang telah dibuat pada bagian sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. IPM atau Human Development Index (HDI) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu pemerintahan dalam bidang pembangunan manusia.
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang harus diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
3. Pada tahun 2011 angka melek huruf sebagai salah satu komponen IPM, di Kabupaten Toba Samosir (98,49 persen) kondisinya sudah lebih tinggi dibanding rata-rata Propinsi Sumatera Utara (97,46 persen).
4. Tingkat melek huruf laki-laki (99,73 persen) di Kabupaten Toba Samosir relatif lebih baik dibanding perempuannya (97,35 persen).
5. Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten Toba Samosir sebesar 9,85 tahun, yang berarti secara

umum penduduk di Toba Samosir sudah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama bahkan sudah sampai kelas satu SLTA.

6. Tingkat kesehatan makro penduduk Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2011 sudah lebih tinggi jika dibanding dengan kondisi Sumatera Utara secara umum. Hal ini dicerminkan melalui angka harapan hidup Toba Samosir 70,75 yang sudah lebih tinggi dari Sumatera Utara yakni 69,65.
7. Standar hidup penduduk Kabupaten Toba Samosir masih lebih tinggi dibanding kondisi di Sumatera Utara. Hal ini tercermin melalui tingkat daya beli penduduk Kabupaten Toba Samosir (Rp. 649.910,-) yang lebih tinggi dari penduduk Propinsi Sumatera Utara (Rp. 640.230,-) secara umum.
8. Status pembangunan manusia di Toba Samosir tahun 2011, berada pada kategori tingkat menengah atas (76,93).

7.2. Rekomendasi terhadap Pemerintah Kabupaten Toba Samosir

Berdasarkan kesimpulan yang didapat beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi terhadap Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan pembangunan manusia khususnya adalah :

1. Perlu perhatian terhadap sektor pendidikan, guna mencapai tingkat melek huruf 100 persen dan juga pencapaian rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi lagi. Dengan tingkat pendidikan yang memadai diharapkan modal dasar bagi penduduk Kabupaten Toba Samosir juga meningkat.

2. Perhatian pada sektor kesehatan harus terus ditingkatkan, guna meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Toba Samosir, walaupun dari hasil penilaian nilainya sudah lebih tinggi dari kondisi di Propinsi Sumatera Utara secara umum. Perhatian yang diberikan adalah penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.
3. Perlu penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia, agar pembangunan ekonomi tetap kondusif terhadap peningkatan kualitas manusia.

LAMPIRAN

<http://tobasamosikab.bps.go.id>

**Tabel 1. Tingkat Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara
Tahun 2011**

Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Toba Samosir	0,27	2,65	1,51
Sumatera Utara	1,28	3,80	2,54

Sumber : BPS

**Tabel 2. Tingkat Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara
Tahun 2011**

Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Toba Samosir	99,73	97,35	98,49
Sumatera Utara	98,72	96,20	97,46

Sumber : BPS

Tabel 3. Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011

Pendidikan	Toba Samosir
[1]	[2]
SD Kebawah	37,01
SMTp	22,13
SMTA	33,93
D I, D II, DIII	2,91
Sarjana	4,02

Sumber : BPS Kabupaten Toba Samosir

Tabel 4. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011

Kelompok pengeluaran	Toba Samosir
[1]	[2]
< 100.000	0,00
100.000-149.999	0,00
150.000-199.999	1,36
200.000-299.999	11,60
300.000-399.999	18,72
400.000-499.999	15,37
500.000 +	52,96

Sumber : BPS Kabupaten Toba Samosir

**Tabel 5. Rata-Rata Pengeluaran / Kapita/ Bulan
di Kabupaten Toba Samosir
Tahun 2011 (Rupiah)**

Daerah	Pengeluaran		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Toba Samosir	426.245	317.649	743.894

Sumber : BPS Kabupaten Toba Samosir

**Tabel 6. Persentase Rata-Rata Pengeluaran / Kapita/ Bulan
di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011**

Daerah	Pengeluaran		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Toba Samosir	57,30	42,70	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Toba Samosir

**Tabel 7. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara
Tahun 2003-2011 (Milyar Rp.)**

Tahun	Toba Samosir	Sumatera Utara
[1]	[2]	[3]
2003	2.014,71	103.401,37
2004	1.748,17	118.100,51
2005	1.895,77	136.903,30
2006	2.121,11	160.376,80
2007	2.414,62	181.819,74
2008	2.744,39	213.931,70
2009	3.056,88	236.353,62
2010	3.429,77	275.700,21
2011	3.857,58	314.156,94

Sumber : BPS

**Tabel 8. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara
Tahun 2003-2011 (Milyar Rp.)**

Tahun	Toba Samosir	Sumatera Utara
[1]	[2]	[3]
2003	1.535,67	78.805,61
2004	1.289,29	83.328,95
2005	1.353,11	87.897,80
2006	1.423,05	93.347,40
2007	1.501,68	99.792,27
2008	1.585,97	106.172,36
2009	1.670,06	111.559,22
2010	1.761,93	118.640,90
2011	1.854,52	126.450,62

Sumber : BPS

**Tabel 9. Perkembangan PDRB Perkapita
Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara
Tahun 2003-2011 (Rp.)**

Tahun	Toba Samosir	Sumatera Utara
[1]	[2]	[3]
2003	12.057.031	8.672.097
2004	11.104.905	9.741.566
2005*)	11.122.020	11.110.401
2006*)	12.400.016	12.875.789
2007*)	14.068.588	14.441.993
2008*)	15.939.458	16.813.290
2009*)	17.701.752	18.381.013
2010*)	19.810.463	21.236.780
2011*)	22.075.081	23.974.865

*) angka hasil Sensus Penduduk 2010 dan backcasting tahun 2005 – 2009
Sumber : BPS

**Tabel 10. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara
Tahun 2003-2011 (%)**

Tahun	Toba Samosir	Sumatera Utara
[1]	[2]	[3]
2003	72,05	4,81
2004	- 16,04	5,74
2005	4,95	5,48
2006	5,17	6,20
2007	5,53	6,90
2008	5,61	6,39
2009	5,30	5,07
2010	5,50	6,35
2011	5,26	6,58

Sumber : BPS



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TOBA SAMOSIR***

Jalan : Somba Debata No. 5 Onan Raja – BALIGE (22315)

Telp. : (0632) 21480 Fax. (0632) 322194

Email : bps1206@mailhost.go.id

<http://tobasamosirkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Jl. Somba Debata No. 5 Onan Raja - BALIGE (22315)

Telp./Fax. 0632 - 21480 e-mail : bps1206@bps.go.id website : <http://sumut.bpa.go.id/tobasa>